

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT SYARIAH  
MAKMUR BANDAR LAMPUNG**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah

**Oleh:**



**Dian Kartika**

**NPM: 1351020042**

**Jurusan: Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2018/1439H**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA BMT SYARIAH  
MAKMUR BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh

**DIAN KARTIKA**  
**NPM 1351020042**

Program Studi Perbankan Syariah



Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.  
Pembimbing II : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

## ABSTRAK

*Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan wadi'ah dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn* (gadai), *ijarah*, *ijarah* multijasa dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan orientasi fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga sosial. *Qardhul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya. Dalam pembiayaan *qardhul hasan* terdapat rukun dan syarat yaitu pelaku akad yang terdiri dari *muqtaridh* (peminjam), *muqridh* (pemberi pinjaman), *qardh* (dana), *shighat* yaitu ijab dan qabul kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Syariah Makmur Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Syariah Makmur. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

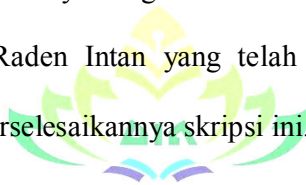
Hasil penelitiannya bahwa implementasi pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan dengan pengisian formulir yang melampirkan fotokopi KTP (suami istri), fotokopi KK dan surat nikah. Setelah itu, pihak BMT Syariah Makmur melakukan penilaian anggota pembiayaan *qardhul hasan* dengan menggunakan analisis 5C yaitu karakter anggota *character*, *chapacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy*. Kemudian dana yang diajukan akan cair setelah kurang lebih 3 hari. Pengembalian dana pinjaman dilakukan sebulan sekali.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pemberian pinjaman *qardhul hasan* sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2017 anggota tidak lagi memilih pembiayaan *qardhul hasan* mereka beralih pada pembiayaan *musyarakah* karena pembiayaan ini menguntungkan bagi pihak BMT maupun bagi pihak anggota. Dari segi keperluan anggota juga lebih tertarik untuk pembiayaan modal usaha. Namun dampak yang dirasakan dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka sangat bersyukur dan merasa terbantu karena pembiayaan ini tidak memberatkan saat pengembalian yang tidak ditentukan jumlah yang angsuran yang harus dibayar dan tenggang waktunya mengikuti kemampuan anggota, tidak memaksa dan tidak ada tambahan sedikitpun dari pengembalian tersebut.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah ‘ala kulli haal*, Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat-Nya, anugerah-Nya dan rahmat-Nya. Kupersembahkan dengan sepenuh hati skripsiku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Puspo Binatmo dan Ibu Eko Anggono Wati terimakasih atas setiap doa, kasih sayang, kerja keras dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik perempuanku semata wayang yang tersayang, Fadhila Afiya yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
3. Almamaterku, UIN Raden Intan yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dian Kartika dilahirkan di Pringsewu, pada hari Rabu, 29 Maret 1995. Pasangan Bapak Puspo Binatmo dan Ibu Eko Anggono Wati Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di TK Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 1 Way Urang Kalianda Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di MTs Al-Fatah Natar Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan di MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung pada tahun 2013. Pada Agustus 2016, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Setia Bakti 1, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selama masa perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi yang bernama Raden Intan Sharia Economic Forum atau yang lebih dikenal dengan UKMF RISEF.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah 'ala kulli haal*, segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita. Berkat Ridho-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung”

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Heni Noviarita, SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses mengerjakan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

6. Pegawai Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas UIN Raden Intan dan Pegawai Perpustakaan Daerah Bandar Lampung.
7. BMT Syariah Makmur khususnya Bapak Moh. Fakhrurozi dan Ibu Siti Royani yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya.
8. Sahabatku tersayang Yulisa Nitami tempatku berkeluh kesah dan berbagi keceriaan serta selalu menghiburku selama 10 tahun lebih ini.
9. Sahabat seperjuanganku selama kuliah Karimah, Wenda, Vina Dita Fransiska, Lusiana Dewi, Inda Areskha dan Alip Prasetya yang telah menemani dan mewarnai hari-hariku selama menjadi mahasiswa S1.
10. Sahabat KKNku tersayang Dewi Handayani, Mira Novalia dan Richa Fransisca yang telah menceriakan hariku selama 40 hari di Desa Setia Bakti I dan hingga saat ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perbankan syariah.

Bandar Lampung, 07 Februari 2018

Penulis,

DIAN KARTIKA

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

## BAB I PENDAHULUAN



A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	11
a. Jenis Penelitian .....	11
b. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	12
3. Metode Pengumpul Data .....	12
a. Metode Observasi .....	13
b. Metode Wawancara .....	14
c. Metode Dokumentasi .....	15
4. Metode Analisis Data .....	16
H. Penelitian Terdahulu .....	18

## BAB II LANDASAN TEORI

<b>A. Pembiayaan.....</b>	<b>21</b>
1. Definisi Pembiayaan .....	21
2. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	23
<b>B. Qardhul Hasan .....</b>	<b>27</b>
1. Pinjaman ( <i>Qardh</i> ) dalam Aspek Syariah .....	30
2. Teori <i>Al-Qardh</i> dalam Fiqih Kontemporer .....	33
3. Pembiayaan Atas Dasar Akad <i>Qardh</i> .....	38
a. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad <i>Qardh</i> .....	38
b. Manfaat <i>Al-Qardh</i> .....	39
4. Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i> .....	41
5. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan .....	42
6. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	43
7. Perbedaan Pinjaman <i>Qardh</i> dengan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	44
8. Implementasi <i>Qardh</i> di <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) .....	45
<b>C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil .....	48
2. Status Badan Hukum BMT .....	49
3. Pendirian dan Permodalan BMT .....	50
4. Prinsip BMT .....	51
5. Tujuan BMT .....	52
6. Kedudukan BMT dalam Lembaga Keuangan di Indonesia .....	53
7. Keunggulan BMT .....	54

## BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Syariah Makmur.....	56
B. Bidang Organisasi dan Keanggotaan.....	60
C. Produk Layanan BMT Syariah Makmur .....	61
D. Kendala-kendala yang Dihadapi BMT Syariah Makmur .....	67
E. Temuan Penelitian .....	69

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data .....	77
B. Pembahasan .....	80

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka penulis akan mengemukakan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.<sup>1</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu: (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyaakah (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 377.

ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

*Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.<sup>3</sup>

BMT Syariah Makmur adalah suatu lembaga keuangan mikro yang didirikan dengan maksud untuk dapat berperan serta membantu usaha mikro kecil dibidang permodalan usaha. BMT Syariah Makmur juga melayani anggota baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan dilakukan dengan pola syariah.<sup>4</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan qardhul hasan di BMT Syariah Makmur adalah penerapan atau pelaksanaan peminjaman dana dari BMT Syariah Makmur dalam bentuk

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cetakan Ke-1, h. 40.

<sup>3</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Edisi Empat, h. 263.

<sup>4</sup>Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Syariah Makmur Bandar Lampung Tahun 2016, h. 1.



uang yang pengembaliannya sesuai dengan yang dia (anggota) dapatkan dan tidak mengandung riba sama sekali. Jika dana yang diberikan digunakan untuk modal usaha kemudian usaha tersebut mengalami peningkatan dalam kegiatannya dan mendapatkan untung maka anggota yang meminjam tidak diwajibkan untuk memberikan keuntungan tersebut kepada BMT Syariah Makmur. Karena pembiayaan *qardhul hasan* ini murni pinjaman.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam setiap penelitian tentunya ada alasan tertentu dalam memilih judul. Adapun yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

### **1. Secara objektif**

Penulis tertarik untuk mengetahui Pembiayaan *Qardhul Hasan* karena pembiayaan *qardhul hasan* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan tolong menolong. Pembiayaan ini berbeda dari pembiayaan lainnya, pada pembiayaan ini sama sekali tidak dikenakan biaya tambahan maupun margin keuntungan.

### **2. Secara subjektif**

Alasan memilih judul secara subjektif terbagi menjadi tiga alasan yaitu:

- a) Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan Jurusan Perbankan Syariah.

- b) Adanya referensi, data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang mudah didapatkan.
- c) Akses letak objek penelitian yang jaraknya dekat dari tempat tinggal penulis sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik.<sup>5</sup> Untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun keluarganya, seseorang dapat meminjam kepada orang pribadi. Jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.<sup>6</sup>

Banyak bank-bank syariah yang tersebar diseluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan

---

<sup>5</sup>Abdurrachaman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, Ed.1.Cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

<sup>6</sup>Euis Amalia, *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Februari 2009), h. 106.

menengah kebawah. Masyarakat kalangan menengah kebawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Faktanya, mayoritas masyarakat kalangan menengah kebawah banyak yang terjebak meminjam kepada rentenir.<sup>7</sup>

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan.<sup>8</sup>

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perum Pegadaian dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan pembiayaan tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Prinsip sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya, sedangkan prinsip ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntutan pelayanan dalam

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.125.

<sup>8</sup>Jaka Sriyana dan Fitri Raya, *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol . 7 No. 1 (Juni 2013), h. 30-31.

pemberian pembiayaan harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.<sup>9</sup>

Kehadiran BMT adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

BMT, selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sebagai organisasi sosial. Dilihat dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>10</sup>

BMT Syariah Makmur merupakan salah satu koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Syariah Makmur telah berbadan hukum koperasi dengan No. 001/BH/X.9/1/2007 tertanggal

---

<sup>9</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 26.

<sup>10</sup>Agnetia Arumastuti, *Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT Akbar Pulokarto Sukoharjo*, Artikel Ilmiah Publikasi, 2016, h. 4-5.

10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung.<sup>11</sup>

Produk pembiayaan di BMT Syariah Makmur meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *rahn*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah multijasa* dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh anggota biasa atau anggota luar biasa yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjam meminjam.<sup>12</sup>

*Qardhul hasan* merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>13</sup>

Pembiayaan *qardhul hasan* yaitu BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan

---

<sup>11</sup>BMT Syariah Makmur, Brosur Koperasi Syariah BMT Syariah Makmur tahun 2010.

<sup>12</sup>Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, *Op. Cit.* h. 19.

<sup>13</sup>Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 288.

tersebut dan disarankan untuk memberikan infak kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan. Pembiayaan *qardhul hasan* ini disamping pemberian bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dan dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BMT khususnya dari anggota dan donatur. Dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh pengurus sampai akhir tahun 2016 ini sebesar Rp. 15.135.376,68 kemudian disalurkan kepada panti asuhan dan *mustahiq*.<sup>14</sup> Pemberian pinjaman *qardhul hasan* kepada anggota BMT Syariah Makmur biasanya sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 3.000.000,-.<sup>15</sup>

Pada dasarnya pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>16</sup>

Ternyata pada prakteknya ditemukan pada BMT Syariah Makmur pendistribusian dana *qardhul hasan* belum sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, 80% penerima dana pembiayaan *qardhul hasan* adalah orang-

---

<sup>14</sup>Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, *Op. Cit.* h. 5.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Royani Staff Administrasi BMT Syariah Makmur, tanggal 26 Oktober 2017 pukul 14:00.

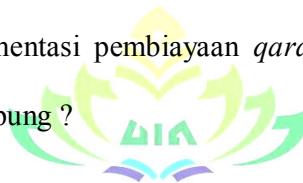
<sup>16</sup>Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 34.

orang yang memiliki jabatan 20% lainnya adalah penerima yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun dana yang digunakan sesuai dengan ketentuan BMT Syariah Makmur itu sendiri yaitu digunakan untuk biaya pendidikan, biaya berobat dan modal usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung ?



#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi BMT Syariah Makmur

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur adalah pelaksanaan fungsi sosial suatu Lembaga Keuangan Syariah, serta sebagai salah satu sarana sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang akad *qardhul hasan*.

2. Bagi Akademis

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai *qardhul hasan* dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian yang berkaitan pembiayaan *qardhul hasan*.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2012), Cetakan Ke-17, h.2.



Artinya, data yang diteliti adalah mengenai pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.<sup>18</sup>

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian deskriptif yaitu suatu uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.<sup>19</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur.

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Tarsito: Bandung, 1995), h.58.

<sup>19</sup>S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 36.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>20</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>21</sup> Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut informan. Informan untuk penelitian ini adalah bapak Moh. Fakhrurozi selaku manajer BMT Syariah Makmur dan ibu Siti Royani selaku Teller BMT Syariah Makmur.

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini untuk sumber data sekunder diambil dari buku dan jurnal. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku RAT dan brosur dari BMT Syariah Makmur

## 3. Metode Pengumpul Data

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu:

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 282.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Alfabeta: Bandung, 2010). h. 103.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>23</sup> Dengan pengamatan seperti ini, maka kenyataan yang ada di lapangan dapat diketahui secara efektif serta dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>24</sup> Hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur dengan cara melakukan pengamatan langsung pada pembiayaan *qardhul hasan* tersebut dan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari *interview*.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di

---

<sup>23</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 203.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Op. Cit.* h. 64.

kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>25</sup>

Penulis akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.<sup>26</sup>

Teknik wawancara ini digunakan untuk mencari informasi terkait keterangan dari yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang

---

<sup>25</sup>*Ibid.* h.72.

<sup>26</sup>*Ibid.* h.74.

lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang:

- 1) Sejarah berdirinya BMT Syariah Makmur, Bandar Lampung
- 2) Dokumen-dokumen tentang BMT Syariah Makmur, Bandar Lampung
- 3) Data-data yang berkaitan dengan subjek/objek yang akan diteliti

Adapun data yang dimaksud diatas adalah meliputi gambaran umum BMT Syariah Makmur, Bandar Lampung, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Metode dokumentasi ini, sebagai metode pembantu dalam mencari data-data yang tergambar di tempat penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Agar data-data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipahami secara menyeluruh, maka diperlukan analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

---

<sup>27</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Salemba Humanika, 2010) h. 143.

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami kemudian temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan terakhir membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>28</sup>

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik komparatif yaitu setelah data dianalisa dengan menghubungkan beberapa teori yang relevan dan ditafsirkan untuk mencoba menemukan penyebab terjadinya kesenjangan tersebut dan memberikan saran serta langkah-langkah yang ditulis dengan kerangka yang disusun, penulis akan menggunakan metode sistematis dengan berfikir induktif, yaitu mengelola data dengan berdasarkan data-data yang khusus menjadi kesimpulan yang umum dan mudah dipahami.

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada tiap-tiap tahapan penelitian hingga tuntas dan jenuh. Salah satu teknik analisis data kualitatif yang paling banyak digunakan dalam penelitian ilmiah adalah dengan mengikuti konsep Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:

- a. Reduksi Data; adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilih dan memilih kemudian melakukan kategorisasi dari data-data

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan.<sup>29</sup>

- b. Display Data; adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart dan yang lainnya. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian. Data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan melalui proses wawancara dan pengamatan perilaku manusia, direkam melalui pencatatan secara tertulis dan pengambilan gambar berupa foto.
- c. Kesimpulan dan Verifikasi; Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban atau solusi yang ditawarkan peneliti atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa temuan baru, memperjelas objek yang sebelumnya sulit dipahami dan solusi atas permasalahan tertentu. Sedangkan verifikasi maksudnya

---

<sup>29</sup>[www.wikipendidikan.com](http://www.wikipendidikan.com), 3 Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman, diakses pada: Rabu, 10 Januari 2018 pukul 13:55.

adalah peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang diperoleh dan pemaknaan yang dilakukan terhadap data tersebut.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, oleh karena itu penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Adapun penelitian tentang *qardhul hasan* yang telah dilakukan peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Heru Sulistyo dan Abdul Hakim meneliti tentang Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan adanya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka. Beberapa lembaga seperti bank syariah, BPR Syariah, BMT, Laznas dan Bazda Kota Semarang dan Bazda Propinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan pembiayaan tersebut namun masih dalam proporsi yang kecil.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Heru Sulistyo dan Abdul Hakim, "Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan", Penelitian Terdahulu, Jurnal Riptek, Vol. 07, No. 1, 2013, h. 39-46.



2. Dedi Riswandi melakukan penelitian mengenai pembiayaan qardhul hasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Mataram. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pembiayaan qardh al-hasan di BSM Cabang Mataram diaplikasikan dalam program yang disebut dengan Program Mitra Umat. Secara garis besar program ini terbagi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi (diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman qardh al-hasan berupa modal usaha atau investasi dan konsumtif) dan kegiatan sosial (sumbangan). Dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan ini BSM Cabang Mataram banyak memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam proses pengajuan dan pembayaran angsuran, sehingga nasabah merasa nyaman dengan pelayanan pembiayaan ini. Akan tetapi, pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi serta kemauan dan kemampuan. Pelaksanaan pembiayaan qardh al-hasan di BSM kota Mataram sudah sesuai dengan syariah, ketentuan dan persyaratan DSN. Kontribusi dana qardh al-hasan bagi Usaha Mikro nasabah adalah adanya peningkatan pendapatan yang rata-ratanya adalah sekitar 66%. Dengan adanya peningkatan pendapatan usaha sebesar 66% berarti pembiayaan qardh al-hasan telah memberikan kontribusi sebesar 18% kepada masyarakat miskin untuk berada di atas batas garis kemiskinan. Selain pendapatan nasabah responden mengalami peningkatan, modal usaha juga mengalami peningkatan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Dedi Riswandi, "Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram",

3. Muhammad Akhyar Adnan dan Firdaus Furywardhana, dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan penelitian ini mengatakan penunggakan pembiayaan qardhul hasan di BNI Syariah Yogyakarta mengalami kenaikan dari 20% hingga 26% melebihi tingkat NPL yang ditetapkan oleh BI yaitu 5%. Hasil yang didapatkan ternyata karakteristik karakter penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang jelek lebih banyak dibandingkan yang baik yang menyebabkan keterlambatan dalam melunasi pembiayaan yang diterima. Adanya persepsi masyarakat masih menilai bahwa *qardhul hasan* merupakan produk sosial yang bersifat bantuan seperti diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor bisa membuat qardhul hasan menjadi tidak lancar. Adanya persepsi BNI Syariah yang menganggap produk *qardhul hasan* merupakan produk sampingan, sehingga pengelolaannya belum dilakukan profesional.<sup>32</sup>

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>33</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>34</sup> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan

---

<sup>33</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 40-41.

<sup>34</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.

prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>35</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi:

1. Aspek Syar'i, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.

<sup>36</sup>*Ibid.* h. 41.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>37</sup>

## 2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.

---

<sup>37</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 40-41.

Diantaranya.<sup>38</sup>

a. *Character* (Karakter atau watak nasabah)

*Character* artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. *Chapacity*

*Chapacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

*Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan.<sup>39</sup> Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam

---

80. <sup>38</sup>Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.

34. <sup>39</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2010), h.

menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of Economy*

*Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah

- 3) Situasi politik
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

f. *Constrain*

*Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Selain 5C, penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (Kepribadian Nasabah) yaitu menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu.
- 2) *Party* (Klasifikasi Nasabah) yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* (Tujuan Nasabah) yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect* (Harapan Kemajuan) yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment* (Pengembalian) yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman.



- 6) *Profitability* (Keuntungan) yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection* (Perlindungan) yaitu bagaimana menjaga agar pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pinjaman yang diberikan benar-benar aman.<sup>40</sup>

## B. Qardhul Hasan

Definisi *Qardh* (Pinjaman) menurut *fiqh*, *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”<sup>41</sup>

*Qardhul hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.” Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.<sup>42</sup>

Adapun pengertian *qardhul hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), h. 41.

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 104.

<sup>42</sup>Wahbah Al-Zulayle, *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence* (Translation of *Al-Fiqh al-Islemiy wa 'Adillatuh*), Vol.1, 370-371.

- a. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.<sup>43</sup>
- b. *Al-Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.<sup>44</sup>
- c. *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>45</sup>
- d. Dalam literatur fiqih klasik *al-qardh* dikategorikan dalam '*aqad ta'awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>46</sup> Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *ta'awun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

---

43 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46.

44 Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 212.

45 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

46 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

Dalam Pembiayaan *qardhul hasan*, utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam adalah seperti mobil, *handphone* atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka. Dipersoalkan apakah dibolehkan untuk membebankan biaya administrasi oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Diatara perkembangan produk pada perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, *qardhul hasan* merupakan salah satu hal yang menarik. Sebagaimana diketahui, perkembangan dari sebuah produk ditentukan, bukan saja oleh preferensi dari nasabah, namun juga preferensi dari pihak bank. Preferensi dari pihak nasabah dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasabah terhadap sebuah produk, boleh jadi karena kemudahan proses atau keringanan dalam kompensasinya. Namun dari pihak bank, yang utama adalah kepastian profit serta kepastian pengembalian. Dilihat dari ini, maka produk *qardhul hasan* adalah suatu hal yang aneh. Produk ini adalah pembiayaan yang ditujukan bagi kaum ekonomi lapis bawah dan berorientasi sosial kesejahteraan. Dikaitkan dengan profitabilitas bank, jelas

hal ini sangat berat. Namun demikian, tanpa produk ini, sebuah bank akan mengingkari eksistensinya sebagai sebuah bank yang berorientasi sosial, sebagaimana misi awal dari tumbuhnya perbankan syariah dan LKS.

## 1. Pinjaman (*Qardh*) dalam Aspek Syariah

Pinjaman (*qardh*) dalam aspek syariah menurut Al-Quran dan Hadits adalah sebagai berikut:

### a. *Qardh*

Hukum *qardh* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awuni 'alaal birri*).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِيعَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang Muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari akhirat (kiamat). Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR. Muslim)

### b. Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan.<sup>47</sup> Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan

---

<sup>47</sup>Muhammad, *Op. Cit.* h. 104.

kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dan masyarakat.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اْلَوْفُوْهُ بِالْعُقُوْدِ ۚ حَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ اْلَاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحِلٍّ اِلَ الصَّيْدِ ۚ نَتْمُ حُرْمَ اِنَّ اَللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah(5): 1)

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/ pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى جُلِيْ هَسْحٰى  
فَاَكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَدْبُ كَاتِبٌ اَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اَللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ اِلٰى عَلَيْهِ اَلْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اَللّٰهَ رَجُوْهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا ۚ اِنْ كَانَ اِلٰى عَلَيْهِ  
اَلْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمْلِىْ هُوَ فَلْيُمْلِلِ  
وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوْهُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ اِنْ م  
يَكُوْنَا جُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَةِ اَنْ  
تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ۚ وَلَا يَدْبُ الشَّهَدَةُ  
اِذَا مَا هُوَ وَلَا تَسْمُوْهُ اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَى  
جَلِيْهِ ۚ ذٰلِكُمْ قَسْطٌ عِنْدَ اَللّٰهِ ۚ قَوْمٌ لِّلشَّهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا  
تَرْتَابُوْهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدْيُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا <sup>ق</sup>وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ <sup>ج</sup>  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ <sup>ج</sup>وَأِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ <sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

#### d. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil dan bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara dan juga tidak cacat hukum.<sup>48</sup>

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ جَلٍّ هَسَىٰ  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ  
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ م

<sup>48</sup>Ibid. h. 105.

يَكُونَا سَجَلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدِينَ لَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَدْبُ الشَّاهِدُ  
إِذَا مَا هُوَ وَلَا تَسْمُوهُ لَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
جَلِيلِهِ ذَلِكُمْ قَسَطٌ عِنْدَ اللَّهِ وَلَهُ قَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَلَدُنِّي أَلَّا  
تَرْتَابُوهُ إِنْ لَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا شَهِدُوهُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberikan keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menuatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalah itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu saling mempersulit. Jika kamu melakukan hal yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah (2): 282)

e. Wanprestasi

Wanprestasi yang dimaksudkan apabila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak disepakati menepati kewajiban terhadap

lembaga dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayanya.<sup>49</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلَى فَلْيَتْبَعْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kedzholiman. Maka apabila salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka hendaklah ia terima pindah.*” (HR. Abu Daud)

## 2. Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Kontemporer

Adapun fikih kontemporer di zaman sekarang lebih membahas permasalahan *al-qardh* yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS), karena *al-qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan pada LKS dan merupakan ciri pembeda yang memisahkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Berikut adalah pembahasan *al-qardh* dalam fikih kontemporer, yang diwakili oleh fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

*Al-qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dalam UU ini *al-qardh* hanya memiliki penjelasan mengenai definisi saja, tanpa ada

---

<sup>49</sup>Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 216.



ketentuan-ketentuan *al-qardh* yang lainnya.<sup>50</sup> Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai *qardh*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, yaitu sebagai berikut:

**Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh***

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua: Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga: Sumber Dana**

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan percayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat: Penyelesaian**

---

<sup>50</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Penjelasan Pasal 19 huruf e.

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika *teklrjadi* perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>51</sup>

Jadi dalam hal ini fatwa DSN-MUI yang pada awalnya merupakan hukum tidak tertulis, setelah melalui proses pada lembaga yang merubah fatwa menjadi peraturan perundangan, dalam hal ini fatwa DSN-MUI dirubah oleh regulator (Bank Indonesia) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebabkan fatwa DSN-MUI haruslah dijadikan rujukan oleh Lembaga Perbankan Syariah maupun LKS sebagai dasar hukum, dalam hal penerapan *qardh*.<sup>52</sup>

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/20015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam salah satu transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*. Pengertian *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi

---

<sup>51</sup>Binti Nur Aisyah, M.Si., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Cetakan 1, h. 299-301.

<sup>52</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), h. 914.

dengan ketentuan bahwa anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>53</sup>

Kemudian penjelasan pada fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa peminjam dana *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari pihak peminjam (*muqtaridh*), hal ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

Apabila peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu, maka LKS/ *muqridh* dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman peminjam atas beban kerugian lembaga, dalam hal ini peminjam digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka lembaga dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan peminjam untuk menutup kewajiban.

Lalu adanya sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual jaminan peminjam untuk menutup kewajiban dan keharusan melunasi sisa utangnya apabila penjualan barang jaminan tidak memenuhi kewajibannya secara penuh bagi

---

<sup>53</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 1 poin 46 *tentang Pengertian Qardh*, h. 10.

peminjam yang mampu, dalam hal ini menurut penulis, aturan ini dimaksudkan menutup celah orang yang beriktikad tidak baik atas pelunasan pinjamannya.

Dan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan *al-qardh* dalam pandangan fikih kontemporer adalah mengenai sumber dana *al-qardh*. Dalam hal ini fatwa telah disebutkan bahwa sumber dana pinjaman *al-qardh* berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Adapun pada perkembangannya para ulama memfatwakan bahwa sumber dana *al-qardh* pada LKS berasal dari Modal LKS, keuntungan yang disisihkan oleh LKS dan infak dari lembaga atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS, hal ini merupakan ijtihad ulama karena akad *al-qardh* ini bukan merupakan akad *tijari* (*profit oriented*), melainkan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) misalnya, tidak dapat menjadi sumber dana *al-qardh*. Hal ini disebabkan kebanyakan anggota yang menabung di lembaga umumnya menginginkan mendapatkan bagi hasil atau bonus. Sedangkan akad *tabarru'* pada *al-qardh* tidak dapat menghasilkan keuntungan.

Secara singkat *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan

jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pemberi pinjaman.

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak peminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.<sup>54</sup>

### **3. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh***

#### **a. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh***

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada peminjam berdasarkan kesepakatan. LKS dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad. LKS juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.

Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan oleh peminjam pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal peminjam digolongkan mampu, namun tidak

---

<sup>54</sup>Drs. Ismail, MBA., Ak., *Op. Cit.* h. 213.

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka LKS dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan.<sup>55</sup>

LKS dapat meminta jaminan kepada peminjam bila dipandang perlu. Peminjam dana *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sanksi yang dijatuhkan kepada peminjam dapat berupa dana tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, peminjam tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>56</sup>

Dengan memperhatikan pengertian akad *qardh* diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pinjaman dana dalam transaksi dengan akad *qardh* adalah pinjaman kebajikan. Dalam transaksi ini LKS berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian peminjamnya secara maksimal.

#### b. Manfaat Qardh

##### 1) Bagi Bank/ LKS

Manfaat pembiayaan berdasarkan akad *qardh* bagi bank/ LKS adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial dan

---

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 222.

<sup>56</sup>Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang *Qardh*.

peluang bank/ LKS untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai pemberian fasilitas *qardh*.<sup>57</sup>

## 2) Bagi Anggota

Manfaat transaksi pembiayaan *qardh* bagi anggota adalah sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial. Selain itu bagi anggota, *qardh* merupakan sumber pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambil alihan kewajiban.<sup>58</sup>

Selain itu, secara singkat manfaat *qardh* bagi masyarakat dan bank syariah sendiri adalah sebagai berikut: (1) membantu anggota pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek, (2) pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah/ LKS untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah/ LKS dalam membantu masyarakat miskin. (3) dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah. (4) meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah/ LKS, karena bank syariah/ LKS dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.* h. 226.

<sup>58</sup>*Ibid.* h. 227.

<sup>59</sup>Drs. Ismail, MBA., Ak., *Op.Cit.* h. 220.

#### 4. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *qardh* dapat berasal dari:

Intern: sumber dana intern untuk *qardhul hasan* berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk *qardh* yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

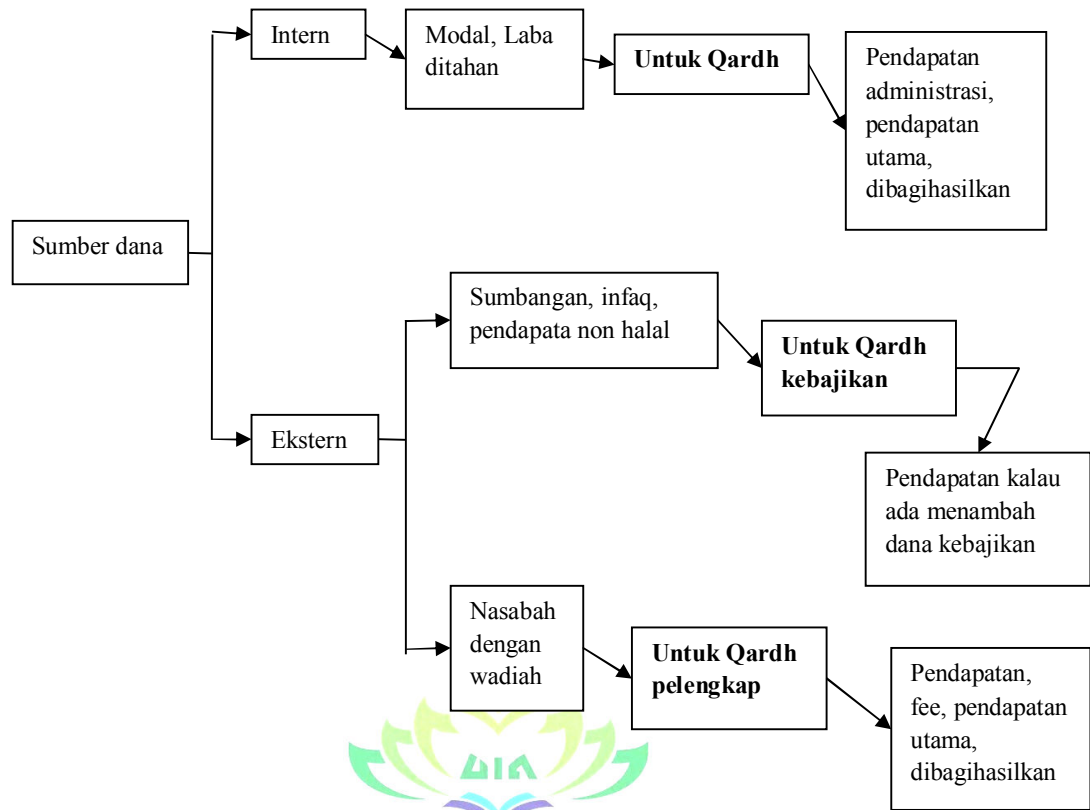
Ekstern: sumber dana ekstern untuk *qardh* dapat berasal dari hasil infaq, sedekah dan sumber dana non halal, yang digunakan untuk *qardh* bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *qardh* yang bersifat komersial. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015), h. 199.



**Gambar 2.2 Sumber Dana Qardhul Hasan**



Sumber: Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015)

## 5. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun qardhul hasan terdiri dari:

- Muqridh*, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- Muqtaridh*, orang yang mempunyai hutang.
- Muqtaradh*, obyek yang dihutangkan.
- Sighat*, akad (ijab qabul).

Syarat dari *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* adalah *ahliyat al-tabarru'*, orang yang mampu mengelola hartanya<sup>61</sup> sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.
- 2) Syarat *muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- 3) Syarat *sighat* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam *sighat ijab qabul* juga tidak mensyaratkan *qardh* sebagai akad lainnya.

## 6. Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- a. *Qardh* dikategorikan akad *ta'awun* (saling tolong-menolong) bukan transaksi komersial.
- b. Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank syariah. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh LKS.
- c. LKS memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenakan biaya apapun. Lebih efektif jika pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan diangsur atau dibayar tunai sekaligus.

---

<sup>61</sup>Nurul Ihsan Hasan, MA., *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Referensi, 2014), Cetakan Pertama, h. 263.

Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir dan bergilir.<sup>62</sup>

#### **7. Perbedaan Pinjaman Qardh dengan Pembiayaan Qardhul Hasan**

Sering kali terjadi penyamaan pengertian antara pinjaman *qardh* dengan pembiayaan *qardhul hasan* dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Kata yang dilekatkan pada *qardh* adalah pinjaman. Sementara kata yang dilekatkan pada *qardhul hasan* adalah pembiayaan. *Qardh* adalah pinjaman yang berarti dana yang disimpan harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman. *Qardhul hasan* adalah pembiayaan. Konsekuensi pembiayaan adalah adanya peluang untung dan rugi. Dengan demikian, jika terdapat keuntungan boleh memberikan bagi hasil kepada yang memberikan pembiayaan. Jika mengalami kerugian maka tidak ada kewajiban memberikan hasil. Disamping itu, karena *qardhul hasan* adalah bersifat kebajikan, maka pokok pembiayaan boleh tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 264.

<sup>63</sup> Muhammad, *Op.Cit.* h. 110.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan antara Pinjaman *Qardh* dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Aspek	Nama Pembiayaan/ Pinjaman	
	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
Istilah	Pinjaman	Pembiayaan
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat
	Cadangan LKS	Infak
	Dana Pihak Ketiga yang tanpa bagi hasil	Sedekah
Pengenbalian Dana	Pokok pembiayaan harus dikembalikan	Pokok pembiayaan bisa dikembalikan bisa tidak
	Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai

Sumber: Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

**8. Implementasi *Qardh* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)**

*Qardh* sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam telah mengimplementasikan di beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Diantara Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah Bank Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Unit Simpan Pinjam Syariah. Namun yang akan dibahas oleh penulis hanyalah implementasi *qardh* di BMT sebagai berikut:

Selain diidentifikasi sebagai lembaga keuangan atau bisnis, BMT juga sering dipahami sebagai lembaga sosial. Pada satu kesempatan BMT dapat menginvestasikan dananya untuk lebih mengembangkan bisnisnya, tetapi pada saat yang lain BMT juga bisa mengembangkan dirinya untuk membantu dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, terutama kebutuhan masyarakat yang bersifat

konsumtif. Pada hal yang pertama BMT berperan sebagai *bayt al-tamwil* dan pada hal yang kedua BMT berperan sebagai *bayt al-mal*.

Pada peran pertama, BMT sebagai *bayt al-mal*, BMT dapat diidentifikasi sebagai lembaga sosial, yakni lembaga yang berperan untuk ikut menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa bagaimana BMT bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari lembaga yang dapat mengadvokasi masalah kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif.

Peran BMT ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *qardh*, yakni pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa ada tambahan apapun. Produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah yang digunakanpun sering disebut dengan *qardhul hasan*. Dalam tataran implementasinya, BMT bertindak sebagai *muqarriidh* (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtaridh*.<sup>64</sup>

*Qardh* di BMT, bagaimanapun merupakan bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan peran sosial dan *non-profit*. Namun demikian, hal ini tidak lantas berarti bahwa BMT harus rugi

---

<sup>64</sup>Dr. Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 151.

dengan berkurangnya modal finansial. Oleh karena itu, dana yang digunakan untuk *qardh* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah itu bisa berasal dari zakat, infak dan sedekah BMT itu sendiri maupun dari pihak luar yang menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada BMT.

Upaya minimalisasi kerugian yang mungkin dialami oleh BMT dalam produk *qardh* ini dapat dilakukan pula dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa biaya administrasi dalam *qardh* dibebankan kepada nasabah. Selain itu, dalam upaya meminimalisasi kerugian BMT yang disebabkan kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya, maka BMT berhak meminta jaminan kepada nasabah yang nilainya lebih besar daripada dana yang dipinjam. Apabila nasabah tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka BMT bisa menjual jaminan nasabah dan mengambilnya sejumlah dana yang dipinjam nasabah, sedangkan kelebihanannya diserahkan kepada nasabah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.* h. 152.

## C. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

### 1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama<sup>66</sup>, yaitu:

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan

---

<sup>66</sup>Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 451.

kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.<sup>67</sup>

## **2. Status Badan Hukum BMT**

Status badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 Provinsi dan Bupati/ Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/ Kota.
- b. BMT yang berbadan hukum yayasan yang tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

---

<sup>67</sup>*Ibid.* h. 452.



- c. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.<sup>68</sup>

### **3. Pendirian dan Permodalan BMT**

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Karena BMT didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat sertifikat operasi/ kemitraan dari PINBUK. Jika telah mencapai nilai aset tertentu, lembaga keuangan segera menyiapkan diri kedalam badan hukum.

BMT dapat didirikan oleh:

- a. Sekurang-kurangnya 20 orang.
- b. Antara satu pendiri dengan pendiri lainnya tidak berhubungan keluarga.
- c. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar BMT.
- d. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika ada rapat pendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Vol. 5, Edisi 2, Oktober 2014.

<sup>69</sup>Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah (Jakarta: PKES, 2006), h. 25.

Modal BMT terdiri dari:

- 1) Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan sama besarnya untuk semua anggota.
- 2) Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Pada pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu empat bulan sejak disepakati dapat terkumpul uang sejumlah:

- a. Minimal Rp. 75 juta untuk wilayah JABOTABEK.
- b. Minimal Rp. 50 juta untuk wilayah ibukota provinsi.
- c. Minimal Rp. 30 juta untuk wilayah ibukota kabupaten/ kota.
- d. Minimal Rp. 20 juta untuk wilayah kecamatan.
- e. Minimal Rp. 25 juta untuk wilayah daerah pesantren.<sup>70</sup>

#### 4. Prinsip BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut:

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik) *thayyiban* (terindah), *ahsanu ‘amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai *salaam*: selamat, damai dan sejahtera.

---

<sup>70</sup>*Ibid.* h. 26.

- b) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d) Demokratis, partisipatif dan inklusif.
- e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f) Ramah lingkungan.
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.<sup>71</sup>

## 5. Tujuan BMT



Peran BMT di Indonesia dalam memberdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro.

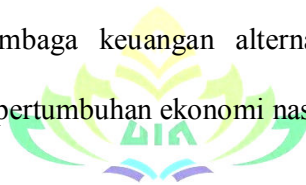
Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.<sup>72</sup>
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

<sup>71</sup>Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah, *Op. Cit.* h. 24.

<sup>72</sup>Nurul Hudadan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), cetakan 1 h. 365.

- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>73</sup>



## 6. Kedudukan BMT dalam Lembaga Keuangan di Indonesia

Kedudukan BMT pada Lembaga Keuangan di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa BMT tidak termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa BMT termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan apabila BMT berbadan Hukum Koperasi.<sup>74</sup> Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa BMT termasuk

---

<sup>73</sup>*Ibid.* h. 366.

<sup>74</sup>Iman Munandar, *Kedudukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Lembaga Keuangan di Indonesia*, [imannumberone.wordpress.com/2013/04/16/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/](http://imannumberone.wordpress.com/2013/04/16/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/) diakses pada Kamis, 23 November 2017, pukul 7:01.

dalam Lembaga Keuangan Mikro. Karena dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah, maka BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Perbedaan pendapat diatas disebabkan bahwa BMT sampai saat ini belum mempunyai payung hukum yang jelas.

## **7. Keunggulan BMT**

Dalam memberdayakan pengusaha kecil dan kecil-bawah serta kaum *dhu'afa*, BMT mempunyai beberapa keunggulan diantaranya:

- a. Pemilihan sistem syariah sebagai syarat pokok pelaksanaan BMT mempunyai kekuatan dalam masyarakat Islam.
- b. Sistem manajemen dan pembukuan BMT yang mengadopsi manajemen modern.
- c. Hubungan pemodal dan pengusaha yang saling asah, asih dan asuh.  
Bantuan BMT tidak hanya terbatas pada permodalan, tetapi juga bimbingan dan penyuluhan.
- d. Pembiayaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengarahan dan pendidikan penggunaan pendapatan perlu dilakukan sejak merumuskan kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaan. Ketika pengelola BMT harus mengarahkan agar pengusaha kecil membuat perencanaan penggunaan keuntungan tersebut secara baik dan benar.

- e. Kegiatan menabung sebagai indikator keberhasilan. Ini juga menjadi indikator kemampuan masyarakat membuat perencanaan hidupnya.
- f. Pembinaan keagamaan. Sebagai lembaga perekonomian Islam, BMT tidak hanya melakukan pengembangan usaha, tapi juga melakukan pembinaan keagamaan terutama yang menyangkut akhlakul karimah, etika pengusaha muslim dan hubungan muamalah secara Islami.
- g. Pengembangan usaha kecil bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat. BMT secara sistematis telah mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota masyarakat.
- h. Memperkuat modal dan posisi tawar masyarakat. Dengan pola koperasi dimana keputusan ditentukan oleh anggota, maka posisi tawar masyarakat makin kuat dan diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dari luar.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 276-279.

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Syari'ah Makmur**

Awal berdirinya BMT Syariah Makmur dimulai dari perkumpulan arisan keluarga dan akhirnya dikembangkan untuk pengembangan umat islam, khususnya di Kota Bandar Lampung jumlahnya cukup besar yang pada umumnya tingkat ekonomi yang mereka lakukan adalah usaha mikro, kecil dan menengah sehingga perlu mendapatkan sentuhan manajemen dan modal. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pemikiran untuk menghimpun masyarakat islam yang jumlahnya cukup besar sebagai kekuatan sumber dana dan apabila kita dapat dengan amanah, aman dan profesional, tentu akan menjadi kekuatan modal untuk memberdayakan ekonomi umat. Disamping itu dana yang berupa amal jariyah, infaq dan sedekah dari kalangan masyarakat islam dapat dihimpun melalui BMT Syariah Makmur yang akan disalurkan bagi kaum dhuafa yang membutuhkan.<sup>76</sup> BMT Syari'ah Makmur didirikan pada tanggal 28 Maret 2004 dengan nama awalnya adalah BMT Amanah. Awal berdirinya BMT Syari'ah Makmur yang saat itu masih bernama BMT Amanah memiliki jumlah anggota pendiri sebanyak 20 orang, diketuai oleh bapak A. Muzakir, S.E. dan Sekretaris Abu Sofyan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Pusat Inkubasi Usaha

---

<sup>76</sup>Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, Laporan Keempat Periode 2013-2018. h. 5.

Kecil (PINBUK) ICMi Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 500/PINBUK/LPG/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, BMT Amanah mulai melakukan kegiatan operasional organisasi. Selama 3 tahun BMT Syari'ah Makmur yang pada saat itu masih bernama BMT Amanah hanya bekerja berdasarkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dengan jumlah terbatas. Hal tersebut disebabkan karena BMT Amanah belum berbadan hukum koperasi, sehingga BMT Amanah tidak dapat memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Berdasarkan rapat pengurus BMT, maka disepakati untuk mengesahkan badan hukum BMT Amanah menjadi koperasi agar BMT dapat lebih berkembang dan dapat memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Selama proses pengesahan badan hukumnya, diketahui bahwa nama koperasi BMT Amanah telah ada lebih dahulu dan telah mendapatkan pengesahan badan hukumnya sebagai koperasi BMT Amanah, sehingga mengharuskan BMT Amanah mencari nama lain untuk dapat mengesahkan badan hukumnya menjadi koperasi<sup>77</sup>. Sejak saat itu disepakati nama BMT Amanah berubah nama menjadi BMT Syari'ah Makmur dengan mendapat legalitas dari Departemen Koperasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum No. 001/BH/X.9/I/2007 Tanggal 10 Januari 2007 yang diproses melalui Notaris bapak Budi Kristiyanto. Dikarenakan status badan hukumnya sudah berubah menjadi koperasi, BMT Syariah Makmur mulai dapat memperoleh pinjaman dari perbankan. Bank pertama yang

---

<sup>77</sup>*Ibid.* h. 7



memberikan pinjaman modal kerja kepada BMT Syariah Makmur adalah Bank BRI Syariah dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pengembalian selama tiga tahun. Berkat adanya pinjaman modal kerja tersebut membuat kemampuan pembiayaan BMT semakin meningkat dan pada gilirannya Sisa Hasil Usaha (SHU) juga ikut meningkat. Selanjutnya pinjaman modal kerja juga di dapatkan dari Pusat Koperasi Syariah Lampung senilai Rp. 200.000.000,-. Sampai saat ini aset koperasi telah berkembang menjadi sebesar Rp 727.613.129,20. BMT Syariah Makmur beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa No. 11A Kecamatan Sukabumi Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung. BMT Syari'ah Makmur merupakan lembaga keuangan mikro berprinsipkan syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi mikro, kecil dan menengah serta membantu usaha mikro di bidang permodalan usaha.<sup>78</sup>

BMT Syari'ah Makmur mempunyai visi memberdayakan Ekonomi Umat berdasarkan syariah, selanjutnya misi dari BMT Syari'ah Makmur adalah:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi-ekonomi umat terutama ekonomi mikro, kecil dan menengah melalui pemberdayaan permodalan syariah, pemberdayaan manajemen dan sumber daya manusia.

---

<sup>78</sup>*Ibid.* h. 10.

- b. Meningkatkan *ukhuwah* umat Islam melalui penggalangan dan pengelolaan ekonomi Islam menuju *kairu ummah*.

Selain memiliki visi dan misi BMT Syariah Makmur juga memiliki tujuan sebagai berikut:

BMT Syariah Makmur didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan memberdayakan ekonomi usaha kecil dan mikro di wilayah Bandar Lampung. Secara organisasi tujuan BMT Syariah Makmur yaitu:

- a. Menjalin *ukhuwah islamiyah*.
- b. Membantu golongan masyarakat kecil dan menengah dengan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip *muamalah islamiyah*.
- c. Membantu masyarakat dalam menunaikan amal ibadah.
- d. Membentuk jaringan ekonomi islam bersama lembaga keuangan syariah lainnya.
- e. Sebagai sarana kesuksesan dunia akhirat melalui penerapan *muamalah islamiyah*.

Kegiatan utama BMT Syariah Makmur adalah menghimpun dana dari anggota baik berupa titipan amanah, investasi *mudharabah* ataupun berupa *infaq*, sedekah dan *jariyah* untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik untuk usaha produktif maupun konsumtif serta talangan dana yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan prinsip syariah Islam berdasarkan kaidah *fiqh* dan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Bidang Organisasi dan Keanggotaan

### a. Kantor Sekretariat Kegiatan

Sampai saat ini Koperasi BMT Syariah Makmur belum memiliki gedung kantor sendiri dan sementara menyewa ruko lantai 2 dengan biaya sewa sebesar Rp. 12.000.000,-/ tahun.

### b. Kepengurusan

Kepengurusan saat ini hasil pemilihan pada tanggal 23 Maret 2013 telah disepakati perubahan susunan pengurus Koperasi BMT Syariah Makmur periode tahun 2013-2018 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Pengurus dan Pengawas**

No.	Jabatan	2013 – 2018
<b>Pengurus</b>		
1.	Ketua	A. Muzakir, S.E.
2.	Sekretaris	Drs. Syafrudin Djahri
3.	Bendahara	Jumiati
<b>Pengawas</b>		
1.	Ketua	Effendi Sunardi, S.E.
2.	Anggota	Helmi, S.E.
3.	Anggota	Munasir, S.T.

### c. Tim Pengelola

Untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi BMT Syariah Makmur dan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Pasal 19 serta untuk meningkatkan kegiatan usaha dan mengembangkan aset BMT, maka pengurus telah menunjuk Tim Pengelola sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Pengelola**

No.	Jabatan	Nama
1.	Manajer	Moh. Fakhrurozi
2.	Kasir	Jumiati

3.	Kolektor	Suparno Irwansyah
4.	Adm. Kantor	Siti Royani

d. Keanggotaan

Perkembangan jumlah anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa selama tahun 2016 (per tanggal 31 Desember 2016) dapat dilaporkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Anggota**

No.	Keanggotaan	2013	2014	2015	2016
1.	Anggota Biasa (orang)	27	27	24	23
2.	Anggota Luar Biasa (orang)	134	194	190	187
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>	<b>221</b>	<b>214</b>	<b>210</b>

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anggota biasa yaitu anggota yang terdaftar dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 50.000,- perbulan.
- 2) Anggota luar biasa yaitu anggota yang terdaftar dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,-/ bulan.

**C. Produk Layanan BMT Syari'ah Makmur**

Sesuai Anggaran Dasar (AD) bahwa tujuan didirikannya koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu sesuai juga dengan Visi dan Misi dan tujuan BMT melakukan 2 kegiatan pokok yaitu bisnis (simpan pinjam) dan kegiatan sosial.

Kegiatan bisnis terutama bergerak dibidang simpan pinjam dengan prinsip syariah dan kegiatan sosial melalui kegiatan bantuan dana lunak tanpa bagi hasil untuk anggota. Secara rinci produk-produk layanan yang ditawarkan oleh BMT Syari'ah Makmur antara lain:

#### 1. Produk Simpanan

- a. Simpanan Mudharabah Umat (SMU) Simpanan Mudharabah Umat merupakan simpanan anggota/ nasabah kepada BMT Syari'ah Makmur yang dapat disetor setiap saat apabila dibutuhkan. Setoran awal minimal Rp 10.000,- dengan setoran minimal selanjutnya Rp 10.000,- sedangkan nisbah bagi hasil yang diberikan adalah 15% dari keuntungan bersih per bulannya.
- b. Simpanan Wadi'ah Umat (SWU) Simpanan Wadi'ah Umat merupakan titipan/ simpanan anggota/ nasabah penabung yang dijamin keutuhan nilainya tanpa ada biaya administrasi pengelolaan dan dapat diambil pada saat diperlukan.
- c. Simpanan Wadi'ah Pelajar (SWP) Simpanan Wadi'ah Pelajar merupakan titipan/ simpanan anggota/ nasabah penabung tanpa ada biaya administrasi yang pengambilannya disesuaikan jadwal kegiatan sekolah yang membutuhkan dana cukup besar.

- d. Simpanan Wadi'ah Qurban (SWQ) Simpanan Wadi'ah Qurban merupakan simpanan anggota/ nasabah kepada BMT Syari'ah Makmur khususnya para anggota atau calon anggota yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan qurban. Pengambilannya adalah satu tahun sekali pada saat satu bulan menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha).
- e. Simpanan Wadi'ah Haji dan Umrah (SWHU) Simpanan Wadi'ah Haji dan Umrah merupakan simpanan anggota/ nasabah penabung tanpa ada biaya administrasi yang pengambilannya adalah pada saat akan melakukan pendaftaran haji atau akan berangkat haji atau umrah.
- f. Simpanan Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS) Simpanan ZIS adalah simpanan anggota/ nasabah penabung yang pengambilannya adalah pada saat akan melakukan pembayaran ZIS.
- g. Simpanan Berjangka Simpanan berjangka merupakan simpanan anggota/ nasabah penabung yang pengambilannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT Syari'ah Makmur adalah untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari anggota dan masyarakat. Dana tersebut mencakup semua sektor ekonomi yang nilai pinjamannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BMT Syari'ah Makmur dengan plafond yang bermacam-macam berkisar

Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00 dengan ketentuan untuk pinjaman sampai dengan nilai Rp.500.000,00 harus disertai jaminan. Jaminan dapat berupa ijazah (nasabah atau ijazah anaknya), sedangkan untuk nilai di atas Rp.500.000,00 disamping jaminan ijazah harus ditambah jaminan barang dapat berupa alat rumah tangga yang nilainya setara dengan jumlah pembiayaan. Jaminan ini dapat disita apabila terjadi cidera akad. Produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Syari'ah Makmur antara lain:

- a. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang dengan sistem jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini memposisikan anggota sebagai pembeli dan BMT Syari'ah Makmur sebagai penjual dengan pembayaran diangsur ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran seluruhnya kembali dilakukan pada saat jatuh tempo.
- b. Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama penyediaan modal usaha dimana BMT Syari'ah Makmur sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola usaha dengan bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMT Syari'ah Makmur dengan anggota/ nasabah peminjam. Perbandingannya dapat berupa (60:40, 50:50, 30:70 dan sebagainya) misalnya 60 untuk nasabah dan 40 untuk pihak BMT Syari'ah Makmur.

- c. Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama penyertaan modal usaha dan kewajiban mengangsur pokok pembiayaan secara berkala dengan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMT Syari'ah Makmur dan anggota/nasabah peminjam.
- d. Pembiayaan Rahn (Gadai) adalah pembiayaan gadai untuk keperluan apa saja dan menyerahkan barang gadai miliknya, pada akhir jatuh tempo harus mengembalikan modal yang dipinjam ditambah dengan biaya gadainya.
- e. Pembiayaan Ijarah Pembiayaan Ijarah adalah pemberian sewa kepada anggota dengan dikenakan upah atas barang itu baik dengan pemindahan atau tanpa pemindahan hak.
- f. Pembiayaan Qardhul Hasan/ Qardh (Pinjaman Kebajikan) yaitu Koperasi BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut kepada anggota tersebut disarankan untuk memberi infak kepada koperasi dan infak tersebut digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan.


Pembiayaan Qardhul Hasan ini disamping bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak



menghasilkan misalnya biaya untuk berobat, untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus.

Syarat-syarat anggota untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan antara lain:

- 1) Anggota tertib dalam melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan.
- 2) Anggota tidak bermasalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang diberikan.
- 3) Anggota membutuhkan dana yang memang mendesak dan tidak dapat dibiayai dari skim pembiayaan yang ada di koperasi BMT Syariah Makmur.



Dan untuk membiayai kegiatan sosial anggota ini dibiayai dari dana yang diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BMT khususnya dari anggota dan dari mustahik pada umumnya. Dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh pengurus sampai akhir tahun 2016 ini sebesar Rp. 15.135.376,63 dan disalurkan kepada panti asuhan dan mustahiq.

Produk Maal BMT Syari'ah Makmur sebagai baitul mal dapat menghimpun zakat, infak dan sedekah (ZIS), terutama dikalangan anggota dan calon anggota sebagai peminjam dari BMT Syariah Makmur. Berdasarkan dana yang terkumpul maka BMT Syari'ah Makmur dapat melaksanakan fungsi

sosialnya untuk kesejahteraan anggota dapat berupa bantuan untuk kematian, kesehatan dan pinjaman Qardhul Hasan (Pinjaman tanpa harus membayar bagi hasil). BMT Syari'ah Makmur juga dapat melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari masyarakat dengan syarat harus memperoleh izin dari pemerintah. Pelaksanaan dan pengelolaan ZIS ini disesuaikan dengan syariat Islam. Penyaluran zakat diarahkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang memerdekakan budak, budak yang berhutang, serta musafir yang melakukan perjuangan di jalan Allah, sedangkan infak dan sedekah diarahkan kepada kegiatan sosial.



#### **D. Kendala-kendala yang Dihadapi BMT Syariah Makmur**

Berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan maka secara umum kendala-kendala di tahun 2016 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Persaingan Usaha**

Bahwa usaha simpan pinjam untuk usaha mikro ini ternyata menarik untuk diusahakan. Pembiayaan atau kredit dari Bank umum khususnya unit usaha mikro yang disalurkan kepada sasaran pembiayaan Koperasi dengan bunga rendah. Bank yang ada antara lain BRI, BSM dan bank lainnya. Selain itu koperasi dan BMT yang terkumpul di pasar tempel Way Dadi antara lain:

- a. Koperasi BTM BiMU
- b. Koperasi BMT Fajar
- c. BMT Darul Muslimin
- d. BMT Aisyiyah
- e. BMT Al-Fadhila
- f. BMT Sepakat serta koperasi lainnya

Dengan banyaknya lembaga/ organisasi yang memberikan pembiayaan ini mengakibatkan semakin sulit untuk menambah nasabah yang potensial. Umumnya kita kurang mampu bersaing dalam pemberian jumlah maksimum pembiayaan.

## 2. Modal Kerja

Modal kerja yang terbatas sehingga terbatas pula kemampuan dalam memberi pelayanan kepada calon anggota baru. Pada umumnya lembaga lain lebih berani memberikan jumlah pembiayaan yang lebih besar. Hal ini terkait kemampuan pemodal yang kita miliki. Untuk itu perlu diupayakan adanya penambahan modal kerja. Omset yang menurun sehingga pendapatan juga menurun, sedangkan biaya-biaya cenderung relatif tetap.

## 3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia khususnya pengelola yang ada saat ini perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Jumlah karyawan pengelola yang perlu ditambah lagi agar penggalan dana simpanan dan penagihan dapat ditingkatkan.

## **E. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Syariah Makmur**

Pembiayaan *qardhul hasan* sudah dilakukan sejak awal berdirinya BMT Syariah Makmur yaitu tahun 2004. Sumber dana *qardhul hasan* diperoleh dari dana cadangan koperasi yang ketentuannya tidak boleh melebihi dana zakat. Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur dilakukan dengan mempertimbangkan kategori penerima pembiayaan. Tidak semua pengajuan akan dikabulkan oleh pihak lembaga, hanya kategori tertentu yang akan diberikan oleh BMT Syariah Makmur. Mengenai hal tersebut, bapak Fakhrurozi menjelaskan sebagai berikut:

Sasaran atau kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* BMT Syariah Makmur sangat selektif memilih calon anggota pembiayaan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* hanya orang-orang yang masuk dalam kategori anggota yang biasanya digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan sekolah, biaya pengobatan, modal usaha dan lain sebagainya. Dengan adanya kategori sedemikian rupa diharapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan BMT Syariah Makmur tepat sasaran. Selain kategori tersebut dalam memberikan pembiayaan juga melalui beberapa tahapan atau proses. Tahapan atau proses pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur pada dasarnya sama dengan pembiayaan lainnya. Syarat untuk

mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* berupa fotokopi KTP suami istri masing-masing 2 lembar, fotokopi KK dan Surat Nikah 2 lembar. Dalam proses pengajuan ini nasabah juga harus menyebutkan alasan mengajukan peminjaman digunakan untuk apa dan menyebutkan berapa jumlah yang diperlukan. Tidak ada batasan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur. Menurut rekapan data pembiayaan *qardhul hasan* periode 2009-2016 paling kecil dana yang dipinjamkan sebesar Rp.200.000 dan paling besar berjumlah Rp. 10.000.000 jika peminjaman dalam jumlah besar maka anggota diharuskan memberikan jaminan kepada pihak BMT Syariah Makmur. Pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur menggunakan analisis pembiayaan seperti produk pembiayaan pada umumnya. Analisis pembiayaan yang digunakan dalam proses survey pembiayaan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Dari hasil survey tersebut bisa dilihat layak atau tidak anggota mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Selain itu berdasarkan hasil survey juga menentukan apakah anggota akan diminta untuk menyertakan jaminan atau tidak. Proses selanjutnya dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah tahap pencairan. Proses ini melibatkan manajer dan juga calon anggota pembiayaan. Melihat hasil survey maka diputuskan anggota tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Jika layak maka dari pihak lembaga akan menghubungi anggota tersebut untuk melaksanakan pencairan dana. Anggota diminta datang

ke kantor kemudian mengisi formulir pembiayaan dan juga melakukan administrasi menjadi anggota (apabila dia belum terdaftar sebagai anggota) BMT Syariah Makmur. Anggota pembiayaan *qardhul hasan* tetap dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan lembaga. Proses pencairan dilakukan setelah pihak pertama yaitu manajer dan pihak kedua yaitu anggota menandatangani akad pembiayaan *qardhul hasan*. Kewajiban selanjutnya dari anggota adalah membayar angsuran atau pinjaman yang telah diberikan. Pembayarannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk pembiayaan *qardhul hasan* jangka waktu pengembalian atau proses mengangsurnya dilakukan 1 bulan sampai paling lama adalah 1 tahun. Jatuh tempo tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal pencairan. Apabila pembayaran angsuran tidak tepat waktu BMT Syariah Makmur tidak memberlakukan sanksi atau bunga, pihak BMT hanya mengingatkan kepada anggota untuk membayar pada waktu jatuh tempo. Pada saat pengembalian peminjam boleh memberikan infaq kepada BMT untuk membantu biaya operasional kerja BMT, besarnya tidak ditentukan dan anggota tidak diwajibkan memberikan infaq tersebut hanya keiklasan dari peminjam saja. Tidak semua pembiayaan yang dilakukan BMT Syariah Makmur berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, termasuk dalam melakukan pembiayaan *qardhul hasan* BMT Syariah Makmur juga mengalami kendala terutama masalah pengembalian pinjaman. Kendala yang pasti dialami yaitu gagal bayar atau pembayaran tidak lancar.

Faktor penyebabnya adalah anggota sering menyepelekan karena pada pembiayaan *qardhul hasan* tidak ada bagi hasil dan tidak ada penambahan bunga seperti saat meminjam pada rentenir. Pembiayaan ini juga tidak memberikan sanksi apapun kepada anggota yang membayar tidak tepat pada waktu jatuh tempo. Namun di BMT Syariah Makmur hingga tahun 2016 tidak mengalami penunggakan, semua anggota sudah melunasi hutangnya. Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pembiayaan *qardhul hasan*, Strategi yang diterapkan oleh BMT Syariah Makmur untuk menangani anggota yang gagal bayar adalah dengan memperpanjang waktu pengembalian dan juga mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya. Ketika sudah diingatkan, dibina, dinasehati, dicarikan solusi namun jika tetap tidak bisa membayar maka pihak lembaga akan mengikhlaskan pinjaman yang tidak dikembalikan dan menganggapnya sebagai *infaq*. Pihak lembaga juga tidak memberikan sanksi kepada anggota yang terlambat membayar angsuran bahkan yang tidak bisa membayar. Namun jika pembiayaan itu menggunakan jaminan, maka pihak BMT akan menggunakan jaminan tersebut untuk membayar hutangnya. Jaminan itu akan dijual, tetapi jika terjual lebih dari hutang anggota maka akan dikembalikan sisanya kepada anggota.<sup>79</sup>

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur dikhususkan untuk kalangan mustahiq namun mereka harus

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Moh. Fakhrurozi, Manajer BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 7 September 2017.

mendaftar sebagai anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 500.000 jika mendaftar sebagai anggota biasa dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 jika mendaftar sebagai anggota luar biasa. Ada perbedaan antara penyaluran pembiayaan dana zakat dengan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*. Dana zakat disalurkan kepada penerima yang berhak, panti asuhan dan membagi sembako untuk masyarakat sekitar. Sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* diharuskan menjadi anggota atau untuk anggota. Sumber dana pembiayaan diambil dari dana cadangan koperasi, dana cadangan koperasi didapat dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Dana yang sudah tersalurkan untuk pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2004 hingga tahun 2016 adalah sebesar Rp.37.800.000 sebanyak 18 anggota yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*. Pemberian dana tidak ditentukan besarnya oleh lembaga, kami memberikan sesuai dengan kebutuhan anggota mulai dari Rp.200.000 hingga Rp.10.000.000 pelunasannya pun bervariasi ada yang 1 bulan sudah melunasi bahkan ada yang sampai 1 tahun.<sup>80</sup>

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* saat ini hanya diperuntukkan untuk biaya sekolah dan biaya berobat, namun saat pertama kali pembiayaan *qardhul hasan* diterapkan di BMT Syariah Makmur, pembiayaan tersebut pernah diberikan untuk modal usaha, oleh anggota yang mendapatkan pembiayaan tersebut digunakan untuk

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Royani, Teller BMT Syariah Makmur Bandar Lampung tanggal 6 September 2017.



membuka toko buku, setelah lima kali meminjam dari BMT Syariah Makmur usahanya mengalami peningkatan kemudian setelah itu anggota tersebut tidak meminjam lagi di BMT Syariah Makmur.<sup>81</sup>

Bapak Munasir adalah seorang pedagang yang pernah mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur. Beliau juga pernah menjadi pengawas BMT Syariah Makmur periode 2013-2018. Beliau meminjam sejumlah Rp. 3.000.000 untuk biaya pendidikan anaknya pada tanggal 31 Januari 2015, beliau mengembalikan dananya dalam jangka waktu 1 bulan. Saat pengembalian terakhir atau pada saat pelunasan beliau memberikan infaq kepada BMT Syariah Makmur untuk ungkapan terimakasih karena telah membantunya dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.<sup>82</sup>



Ibu Suryati adalah seorang pedagang sayur keliling yang pernah mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur pada tanggal 4 Januari 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000 yang digunakan untuk biaya pendidikan anaknya. Beliau mengembalikan dana pinjamannya dalam waktu 4 bulan. Pembayaran

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati, Bendahara BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 5 Maret 2018.

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Munasir, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 9 Maret 2018.

infaq yang Ibu Suryati berikan kepada BMT Syariah Makmur beliau serahkan di akhir pembayaran angsuran setelah pelunasan.<sup>83</sup>

Ibu Sri Lestari adalah seorang pegawai di suatu rumah makan di daerah Teluk Betung beliau juga adalah salah seorang anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur. Beliau meminjam dengan jumlah yang cukup besar dan dalam satu bulan beliau mengajukan peminjaman dua kali yang pertama pada tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 5.000.000 kemudian yang kedua pada tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 10.000.000 dengan waktu pengembalian yang pertama adalah 15 bulan kemudian yang kedua adalah 30 bulan. Beliau adalah seorang janda dengan 2 orang anak yang masih sekolah. Beliau mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan anaknya dan untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit. Beliau memberikan infaq kepada BMT Syariah Makmur setelah melunasi angsuran tersebut.<sup>84</sup>

Ibu Hatin Resmiasih adalah seorang pedagang di Pasar Tempel Sukrame beliau adalah salah satu anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur pada tanggal 21 Maret 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan waktu pengembalian 2,5 bulan. Beliau menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya pendidikan

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Suryati, Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 11 Maret 2018.

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Lestari, M, Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 10 Maret 2018.

anaknya. Beliau memberikan infaq kepada bmt Syariah Makmur di akhir pelunasan pinjaman tersebut.<sup>85</sup>

Bapak A. Muzakir adalah seorang pensiunan PNS yang pada tahun 2013-2018 adalah seorang ketua BMT Syariah Makmur. Beliau pernah mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* pada tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 10 bulan. Kemudian beliau mengajukan lagi pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 2.500.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Beliau menggunakan uang tersebut untuk biaya pendidikan anaknya. Angsuran pembiayaan dilakukan sebulan sekali dengan jumlah pengembalian sesuai dengan kemampuan peminjam. Setelah melakukan pembayaran angsuran terakhir beliau memberikan infaq kepada BMT Syariah Makmur.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Hatin Resmiasih, Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 11 Maret 2018.

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak A. Muzaki, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, tanggal 13 Maret 2018.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan BMT Syariah Makmur, hal ini dilakukan dengan cara membandingkan implementasi pembiayaan *qardhul hasan* dengan teori-teori tentang Pembiayaan *Qardhul Hasan*, untuk mendapatkan kesimpulan apakah BMT Syariah Makmur telah mengimplementasikan pembiayaan *qardhul hasan* sesuai dengan syariat Islam atau sama dengan Koperasi Konvensional pada umumnya.

#### A. Analisis Data



Analisa Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Sebagaimana telah dipaparkan pada temuan penelitian bahwa implementasi dari pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah yaitu berlandaskan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

*(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Untuk prosedurnya pembiayaan BMT Syariah Makmur menggunakan prosedur seperti pembiayaan lainnya yaitu dengan syarat mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP suami istri, Surat Nikah, fotokopi KK serta jaminan apabila diperlukan. Anggota datang ke BMT dengan membawa persyaratan serta menjelaskan keperluan mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* untuk apa dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Proses pencairannya dilakukan setelah pihak BMT melakukan penilaian. Pencairan biasanya dilakukan kurang lebih tiga hari setelah pengajuan. Pencairan dilakukan setelah ditandatanganinya akad pembiayaan dari kedua belah pihak. BMT Syariah Makmur menetapkan sistem angsuran bulanan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Anggota boleh memilih jangka waktu pembiayaan antara satu sampai tiga tahun. Proses pembayaran angsuran bisa dilakukan di kantor. Kendala yang dialami BMT Syariah Makmur pada saat melaksanakan pembiayaan *qardhul hasan* adalah gagal bayar atau proses penunggakan cicilan macet. Strategi yang dilakukan BMT Syariah Makmur untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian serta mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya. Pihak BMT memberikan banyak kelonggaran dan kemudahan dalam membayar cicilan. Jika anggota belum membayar angsuran atau tidak mampu membayar pihak BMT akan melakukan pendekatan personal dan persuasif agar anggota mau

membayar walau mencicil hingga lunas. Sejauh ini semua anggota yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* sudah melunasinya. BMT Syariah Makmur juga memberikan pembinaan terhadap anggota pembiayaan *qardhul hasan*, yang dilakukan dengan berdiskusi mengenai strategi berbisnis maupun masukan terhadap usaha dari anggota. Jumlah dana yang telah tersalurkan oleh pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2009 hingga tahun 2016 adalah sebesar Rp.37.800.000 dengan jumlah penerima 18 orang anggota. Anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* kebanyakan adalah pengurus BMT tersebut tetapi ada juga yang bukan pengurus dari 18 orang 4 orang yang mendapat pembiayaan *qardhul hasan* bukan termasuk pengurus dan 14 orang lainnya adalah pengurus. Sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* adalah dari dana cadangan koperasi yang batasannya tidak boleh melebihi dana zakat yang ada, dana cadangan koperasi bersumber dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Berbeda dengan dana zakat yang penyalurannya diberikan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk sembako atau membagikannya kepada panti asuhan. Sedangkan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada anggota yang termasuk golongan orang yang tidak mampu atau untuk keperluan mendesak dalam bentuk pinjaman yang digunakan modal usaha, biaya pengobatan dan biaya pendidikan. Distribusi pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan oleh BMT Syariah Makmur mampu menghantarkan dan mendukung program pemerintah wajib belajar 12

tahun. Anggota yang awalnya kesulitan untuk biaya pendidikan anaknya bisa terbantu dengan pembiayaan *qardhul hasan* dari BMT Syariah Makmur. Pinjaman dari BMT digunakan untuk keperluan siswa/ siswi seperti biaya pendaftaran serta membeli seragam sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya. Pengawasan terhadap prestasi siswa/ siswi anggota yang dibiayai juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* tepat sasaran. Sedangkan dari segi kesehatan anggota yang diberikan pembiayaan *qardhul hasan* untuk pengobatan dapat membeli obat yang lebih baik untuk hasil pemulihan yang lebih cepat. Dan dari segi modal usaha BMT Syariah Makmur bukan hanya memberikan dana tetapi juga memberikan pembinaan kepada anggota yang ingin membuka usaha dan memberikan solusi apabila usaha anggota tidak berjalan sesuai keinginan.

## **B. Pembahasan**

Implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur sesuai dengan definisi *al-qardh* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001<sup>87</sup>, pada BMT Syariah Makmur setelah pembiayaan disalurkan maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya. Ketentuan mengangsurnya ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan dana. Meskipun sudah ditetapkan namun dalam hal mengangsur pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur masih fleksibel, bisa diangsur tanggal berapapun

---

<sup>87</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Tentang Al-Qardh*, Jakarta Pusat, 2001, h. 1.

setiap bulannya dan apabila mengalami keterlambatan mengangsur juga tidak dikenakan denda oleh pihak BMT.

Dalam analisa penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fakhrurozi, Ibu Siti Royani dan Ibu Jumiaty selaku pengurus BMT Syariah Makmur dan hasil wawancara dengan 5 anggota yang pernah melaksanakan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan. Dalam menjalankan pembiayaan *qardhul hasan* BMT Syariah Makmur berlandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280<sup>88</sup>. Dari ayat ini jelas Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidupnya dengan memberi pinjaman dilandasi niat yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun atas bantuan yang kita berikan. Prinsip ini digunakan oleh BMT Syariah Makmur untuk memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada anggotanya.

Selanjutnya ada kategori tertentu anggota yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* adalah anggota yang memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan biaya pengobatan. Hal ini diperkuat oleh teori Nurul Ihsan Hasan, MA<sup>89</sup> yang sudah dibahas di bab landasan teori. Pada dasarnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan

---

<sup>88</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-quran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 53

<sup>89</sup>Nurul Ihsan Hasan, MA., *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Referensi, 2014), Cetakan Pertama, h. 263.



perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi seperti biaya materai, biaya pendaftaran menjadi anggota dan lain-lain sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindarkan. Biaya-biaya administrasi tersebut merupakan faktor penunjang dimana tidak tercantum dalam *nash*. Oleh karenanya para ulama mengambil interpretasi dari Al-Quran dan Hadits yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut menjadi wajib adanya.

Tahapan selanjutnya dari proses pembiayaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembiayaan. Di BMT Syariah Makmur persyaratan untuk melakukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah menyetorkan fotokopi KK, Surat Nikah dan KTP suami isteri. Persyaratan memang hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, namun mengenai persyaratan juga tergantung oleh lembaga masing-masing.

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Syariah Makmur akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam melakukan penilaian diharapkan BMT Syariah Makmur mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana *qardhul hasan* dapat dipertanggungjawabkan. Pada penilaian ini juga yang menentukan apakah pencairan bisa dilakukan atau

tidak dan juga menentukan apakah pemohon pembiayaan diminta untuk menyerahkan jaminan atau tidak.<sup>90</sup>

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Syariah Makmur adalah dengan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Analisis ini didukung oleh teori Aisyah<sup>91</sup> yang sudah dipaparkan bab landasan teori. Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan penilaian. Jika karakternya baik pasti akan bertanggungjawab dengan pinjaman yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat memberikan pinjaman atau menyalurkan pembiayaan pastinya ada kendala yang dialami oleh BMT Syariah Makmur termasuk dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan*. Kendala yang pasti terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam memberikan pembiayaan ternyata BMT Syariah Makmur banyak menemukan anggota pembiayaan yang terlambat dalam mengembalikan pinjamannya. Banyak faktor penyebabnya diantaranya anggota menyepelekan tanggung jawabnya, dananya habis dipakai untuk lain hal, sehingga tidak dapat mengembalikan dan sebagainya. Karena mereka mengetahui dalam pembiayaan *qardhul hasan* apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu maka tidak ada sanksi yang diberikan

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Fakhrurozi Manajer BMT Syariah Makmur, tanggal 7 September 2017.

<sup>91</sup>Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras 2014), h. 80.

kepada anggota pembiayaan. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalurkan dana, karena *qardhul hasan* tidak menggunakan profit atau bagi hasil dan dana yang dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada anggota lain. Strategi yang dilakukan BMT Syariah Makmur apabila anggota telat membayar atau tidak mau membayar adalah dengan melakukan pendekatan personal dan persuasif hingga anggota tersebut mau melunasi pinjamannya.

Sumber dana *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur berasal dari dana cadangan koperasi yang didapat dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Mengenai sumber dana *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang sumber dana *al-Qardh* pada poin b yaitu keuntungan LKS yang disisihkan. Pada teori Djoko Muldjono<sup>92</sup> sumber dana *qardhul hasan* terbagi menjadi dua macam yaitu internal dan eksternal. Dana internal berasal dari modal dan laba sedangkan dana eksternal berasal dari hasil infaq, sedekah dan dana non halal. Pada BMT Syariah Makmur dana eksternal seperti dana zakat, infaq, sedekah, pendapatan non halal dan dana sosial hanya diperuntukkan untuk kegiatan sosial seperti pemberian sembako kepada masyarakat sekitar BMT dan kepada panti asuhan.

Mengenai pengenaan biaya administrasi dalam Pasal 18 PBI No. 7/46/PBI/2005, menjelaskan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *Al-qardh* poin c yaitu Bank/ Lembaga Keuangan

---

<sup>92</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015), h. 199.

Syariah dapat membebankan kepada peminjam, biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman. Di BMT Syariah Makmur biaya administrasi dibebankan saat mendaftar menjadi anggota jika menjadi anggota biasa sebesar Rp.500.000 untuk simpanan pokok dan Rp.50.000 untuk simpanan wajib perbulan dan anggota luar biasa sebesar Rp.100.0000 untuk simpanan pokok dan Rp.20.000 untuk simpanan wajib perbulan.<sup>93</sup>

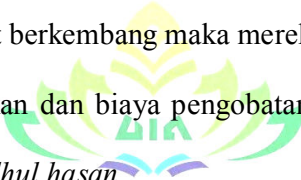
Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Syariah Makmur memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini BMT Syariah Makmur sudah mengamalkan Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang sudah dipaparkan pada bab landasan teori. Pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur hanya dalam bentuk uang tunai. Batasan dana yang boleh dipinjam oleh anggota tidak ditentukan tetapi BMT Syariah Makmur mempunyai ketentuan dalam memberikan dana ini tidak boleh melebihi dana zakat. Se jauh ini pinjaman yang pernah diberikan nasabah paling sedikit sebesar Rp.200.000 dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000. Untuk pengembalian paling lama adalah 1 tahun dan paling cepat adalah 1 bulan. Pembayaran dilakukan setiap bulan tetapi tidak ditentukan berapa besaran yang harus dibayarkan setiap bulannya tergantung kemampuan dari si peminjam. Peminjam juga boleh memberikan infaq dan boleh juga tidak membayar infaq setelah pelunasan, besarannyapun tidak ditentukan sesuai keikhlasan anggota saja guna membantu operasional kerja BMT Syariah Makmur.

---

<sup>93</sup>Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi BMT Syariah Makmur Tahun Buku 2016, disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 26 Maret 2017 Bandar Lampung, Laporan Keempat Periode 2013-2018. h. 12.

Dampak yang dirasakan oleh anggota adalah mereka sangat bersyukur dan sangat terbantu karena adanya pembiayaan *qardhul hasan*, prosesnya sangat mudah, tidak ada bagi hasil dan tidak ada tambahan apapun jadi tidak memberatkan sama sekali, angsurannyapun tidak ditentukan setiap bulan harus membayar berapa.

Menurut rekapan data dalam buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) pembiayaan *qardhul hasan* mengalami penurunan peminat, pada tahun 2017 pembiayaan ini sama sekali tidak ada lagi yang mengajukan dikarenakan pembiayaan ini tidak menguntungkan bagi pihak BMT dan bagi pihak anggota yang ingin mencari keuntungan. Saat ini kebanyakan dari anggota memilih pembiayaan *musyarakah* karena mereka butuh modal untuk usaha dan jika usaha tersebut berkembang maka mereka bisa memenuhi kebutuhan seperti biaya pendidikan dan biaya pengobatan sekaligus seperti yang ada pada pembiayaan *qardhul hasan*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis memaparkan kesimpulan yang dirangkum dari data-data yang didapatkan sebagai berikut:

Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur sudah dilaksanakan dari awal berdirinya. Sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana cadangan koperasi yang didapat dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Prosedur peminjaman adalah dimulai dari menyerahkan syarat kemudian pihak BMT menganalisa calon peminjam setelah 3 hari dana yang diajukan akan cair dan diberikan kepada peminjam. Pengembalian pinjaman dilakukan sebulan sekali dan diakhir pengembalian anggota boleh memberikan infaq dan boleh juga tidak kepada BMT Syariah Makmur. Dampak yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka sangat bersyukur dan sangat terbantu karena dapat membayar biaya pendidikan dan biaya berobat dengan tanpa ada tambahan sedikitpun dari segi besaran dan waktunya pun tidak ditentukan jadi tidak memberatkan. Namun pada tahun 2017 pembiayaan *qardhul hasan* dikarenakan pihak BMT dan pihak anggota lebih memilih pembiayaan *musyarakah* karena saat ini anggota lebih menginginkan pembiayaan untuk modal usaha dan juga menguntungkan bagi masing-masing pihak.

## B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Penulis menyarankan kepada Manajer dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan kepengurusan BMT Syariah Makmur untuk menambahkan cakupan pemberian pembiayaan *qardhul hasan* lebih luas lagi kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk membantu kesejahteraan mereka sekaligus untuk kesejahteraan ekonomi Indonesia. Jika masyarakat miskin semakin berkurang maka berdampak pula kepada kesejahteraan perekonomian Indonesia. Dan diharapkan pula BMT Syariah Makmur terus *istiqomah* dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah yang tanpa riba salah satunya dengan terus mengembangkan pembiayaan *qardhul hasan* karena hanya pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung riba).

Untuk nama BMT Syariah Makmur saya menyarankan untuk mengganti Syariah dengan kata lain karena BMT sendiri sudah menjelaskan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga syariah jika ditambahkan lagi dengan kata Syariah setelah kata BMT akan menjadi pemborosan kata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)" Penelitian Terdahulu. JAAI Volume 10. No. 2. Desember 2006.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014).
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Cetakan Pertama (Semarang: Tohaputra, 1987).
- Al-Zulayle, Wahbah. *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence* (Translation of *Al-Fiqh al-Islemiy wa 'Adillatuh*) Vol.1.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Amalia, Euis. *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*. Jurnal Iqtishad. Vol. 1. No. 1 (Februari 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah* dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research* (Tarsito: Bandung, 1995).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Arintasari, Wini. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013).
- Arumastuti, Agnetia. *Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT Akbar Pulokarto Sukoharjo*. Artikel Ilmiah Publikasi. 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Bank Indonesia. *Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan*



*Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005).

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

BMT Syariah Makmur, Brosur Koperasi Syariah BMT Syariah Makmur tahun 2010.

Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Syariah Makmur Bandar Lampung Tahun 2016

Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah (Jakarta: PKES, 2006).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Djazuli, A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang *Qardh*.

Haida, Nur. "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah di Indonesia". Penelitian Terdahulu. Prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. 2015. Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2010).

Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Referensi, 2014).

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Salemba Humanika, 2010).

Hudadan, Nurul dan Mohamad Heykal *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Margono, S. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Masyithoh, Novita Dewi. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Vol. 5. Edisi 2. Oktober 2014.
- Muhammad. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Cetakan Ke-1.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015).
- Munandar, Iman. *Kedudukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Lembaga Keuangan di Indonesia*. [imannumberone.wordpress.com/2013/04/16/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/](http://imannumberone.wordpress.com/2013/04/16/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/) diakses pada Kamis, 23 November 2017, pukul 7:01.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015). Edisi Empat.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Qadir, Abdurrachaman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*. Edisi Pertama. Cetakan ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.* Penjelasan Pasal 19 huruf e.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Riswandi, Dedi. "Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram". Penelitian Terdahulu. *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14. No. 2. Desember 2015. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Mataram.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009).

Sulistyo, Heru dan Abdul Hakim. "Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan". Penelitian Terdahulu. *Jurnal Riptek*. Vol. 07. No. 1. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Alfabeta: Bandung, 2010).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2012). Cetakan Ke-17.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2007).

Susanto, Hery dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Sriyana, Jaka dan Fitri Raya. *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7 No. 1 (Juni 2013).

Tika, Moh. Pabundu. *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

Yaya, Rijal. Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

[www.wikipendidikan.com](http://www.wikipendidikan.com). 3-Langkah-Analisis-Data-Kualitatif-Model-Miles-dan-Huberman, diakses pada: Rabu, 10 Januari 2018 pukul 13:55.

